

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Eko Widiarto. Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. Volume 16 No. 1.
- Abdul Waid. 2018. Meneguhkan Bawaslu Sebagai ‘Lembaga Peradilan’ Dalam Bingkai Pengawasan Pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*. Volume 1 No. 1.
- Aco Marwan and others. 2021. *Kekuasaan Kehakiman Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Teori Kekuasaan Kehakiman Al-Mawardi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Adelia Rahmawati Putri and Anajeng Esri Edhi Mahanani. 2022. Putusan Positive Legislature Pada Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Wakil Menteri. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*. Volume 2 No. 1.
- Aermadepa Aermadepa, et al. 2024. *Penegakan Hukum Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Agung Abdullah. 2020. Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Volume 6 Nomor 3.
- Ahmad Habib Al Fikry. 2022. Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

tentang Ibu Kota Negara. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Volume 3 Nomor 8.

Ahmad Rayhan and Qotrun Nida. 2021. Hierarkie Lembaga Negara Di Indonesia. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Volume 1 No. 1.

Amril Nurman. 2019. *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013*. Diss. Universitas Islam Indonesia.

Anisa Dwi Rachmadika, A Zarkasi, and Syamsir Syamsir. 2024. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Volume 4 No. 3.

Atang Hermawan Usman. 2014. Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Volume 30 Nomor 1.

Aufi Imaduddin and others. 2014. *Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman (Studi Tentang Urgensi Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Pasca Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014)*. Universitas Islam Indonesia.

Bagir Manan and Susi Dwi Harijanti. 2017. Artikel Kehormatan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. Volume 4 Nomor 2.

- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju Cetakan Kesatu.
- Belly Isnaeni. 2021. Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. Volume 6 No. 2.
- Benni Erick and M. Ikhwan. 2022. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*. Volume 5 Nomor 2.
- Bimo Fajar Hantoro. 2024. Pembatasan Yudisial Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada. *Media Iuris*. Volume 7 Nomor 1.
- Bustanul Arifien, Hedwig A. Maulana, and Mardi Candra. 2025. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Hubungan antar Lembaga Negara. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*. Volume 2 No. 7.
- Carolina Da Cruz et al. 2022. The Implementation of Good Governance Principles in Admission of Prospective Civil Servants. *Jurnal Daulat Hukum*. Volume 5 Nomor 1.
- Dachran Busthami. 2017. Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*. Volume 46 No. 4.
- Danang Enggartyasto. 2022. *Problematika Pelaksanaan Pilkada Serentak Saat Pandemi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Di Kabupaten Sleman*.

- Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri. 2023. Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*. Volume 6 Nomor 2.
- Duwi Handoko and others. 2015. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Hawa dan AHWA.
- Elviandri Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, and Absori Absori. 2019. *Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia*.
- Fabio Emiliano Kolang, Audi Pondaag, and Josina Londa. 2022. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Lex Administratum*. Volume 10 Nomor 4.
- Farida Tuharea. 2025. *Hukum Tata Negara "Teori Dan Praktik"*. TOHAR MEDIA.
- Fauzi Iswari. 2020. Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. Volume 6 Nomor 1.
- Firial Tiara Efriliani, et al. 2026. The Function of Legislation in Ensuring Legal Certainty and Good Governance." *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Volume 4 Nomor 1, hlm. 644-656.

- Fransiska Adelina Sinaga. 2018. Legalitas Penunjukan Pejabat Polri Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Pada Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Haeruman Jayadi, A D Basniwati, and Sofwan Sofwan. 2022. Lembaga-Lembaga Negara Sederajat Dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Kompilasi Hukum*. Volume 7 Nomor 2.
- Hananto Widodo and Dicky Eko Prasetyo. 2021. Penataan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu. *Perspektif Hukum*.
- Ilham Fahrul R Ibrahim. 2021. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Dan Legitimasi Pemerintahan Demokrasi. *Lex Crimen*. Volume 10 Nomor 8.
- Imam Abdul Rokhim and others. 2017. *Rekonstruksi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Ruu Jabatan Hakim*. Universitas Islam Indonesia.
- Indra Jaya M Hasibuan. 2019. *Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman*.
- Ivani Ananda, Alya Alania Basmine, and Nadhira Putri. Tindak Pidana Korupsi oleh Partai Politik: Urgensi dan Implikasi Hukum terhadap Pembubarannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*. Volume 5 Nomor 2.

- Jabaruddin Jabaruddin. 2022. Penyelesaian sengketa tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui pengadilan tata usaha negara. *Lakidende Law Review*. Volume 1 Nomor 1.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konsititusi Press.
- Josepus Pinori, Tommy Sumakul, Nelly Pinangkaan, Rudy Watulingas, and Syamsia Midu. 2023. Dispute Resolution of State Auxiliary Institutions in Indonesia: Comparative Study in Several Countries. *JL Pol'y & Globalization*. Volume 134.
- Kaharuddin Kaharuddin, et al. 2025. Omnibus Law In The Dynamics Of Constitutional Law: A Comparative Research Of Indonesia, The United States, The Philippines, And Canada, *Administrative and Environmental Law Review* Volume 6 Nomor 1, hlm. 1-22.
- Kelik Iswandi. 2023. Extending the Legal Standing on Authority Disputes at the Indonesian Constitutional Court. *Constitutionale*. Volume 4 No. 2.
- M. Afif Hasbullah. 2021. The Position of the Indonesian Competition Commission as a State Auxiliary Organ in the Indonesian Constitutional System. *LEGAL BRIEF*. Volume 11 No. 1.
- M. Natsir Asnawi. 2019. Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak. *Al Iqtishadiyah*

- Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 5 No. Pengasuhan Anak; Pengasuhan Bersama.
- M. Nur Sholikin. 2018. Penataan kelembagaan untuk menjalankan reformasi regulasi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pasar Modal*. Volume 8 Nomor 15.
- M. Syaiful Aris. 2022. Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional. *Jurnal Media*. Volume 5 Nomor 3.
- Ma'shum Ahmad and others. 2008. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang Undang Dasar 1945*. Universitas Islam Indonesia.
- Marsudi Dedi Putra. 2021. Negara kesejahteraan (welfare state) dalam perspektif Pancasila. *Likhitaprajna*. Volume 23 No. 2.
- Mohd Yusuf DM et al. Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*. Volume 5 No. 1.
- Muh Ridha Hakim and others. 2018. Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/Interpretation Of Judicial Power Independence In Constitutional Court Decisions. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Volume 7 No. 2.
- Muliadi Anangkota. 2017. Klasifikasi sistem pemerintahan (perspektif pemerintahan modern kekinian). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 3 No. 2.

- Munif Rochmawanto, Munif et al. 2025. *Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Kepala Daerah*. CV. Penerbit Ilmu Literasi dan Riset (Pilar).
- Nazjwa Fatharani et al. 2024. Peran Dan Tantangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*. Volume 1 No. 2.
- Nehru Asyikin. 2020. Checks And Balances Legislatif Eksekutif Terhadap Perjanjian Internasional Pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*. Volume 3 Nomor 2.
- Nelly Mulia Husma, Faisal A Rani, and Syarifuddin Hasyim. 2017. Kewenangan Pengaturan Mahkamah Agung (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan). *Syiah Kuala Law Journal*. Volume 1 No. 1.
- Novianto M Hartono. 2017. Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. Volume 7 No. 2.
- Nurtjahjo Hendra. 2005. Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Volume 3.
- Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.

Prianter Jaya Hairi. 2016. Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*. Volume 2 Nomor 1.

Puguh Apriyanto. 2025. *Pengujian Formil Putusan Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Keadilan*. UNS (Sebelas Maret University).

Putra Astomo. 2018. Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia dalam Uud Nri Tahun 1945. *Jurnal Hukum Unsulbar*. Volume 1 Nomor 1.

Putu Ayu Veguita Putri Ningsih and Irsyaf Marsal. 2025. Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang Dan Hambatannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 3 Nomor 5, hlm. 7373-7391.

Qurrata Ayuni, Satya Arinanto, Fitra Arsil, dan Maria Farida Indrati. 2022. Concept and Implementation on the State of Emergency in Indonesia: Outlook to Strengthen Checks and Balances during Crisis. *Revista de Investigações Constitucionais*. Volume 9 No. 1.

Qurrata Ayuni. 2018. Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 48 Nomor 1.

- R Wiyono. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raihan Syafiq Ramadhan and others. 2022. *Keadilan Elektoral Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rajab Ahirullah dan Muhtar Said. 2023. Urgensi Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *ADVANCES in Social Humanities Research*. Volume 1 No. 9.
- Regina Angelita Br Sebayang dan Hartati Hartati. 2021. Peran Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*. Volume 2 No. 2.
- Rifaldy Andika Musak. 2019. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia Mengacu Kasus Pelanggaran Ham Wamena 4 April 2003. *Lex Et Societatis*. Volume 7 No. 2.
- Rizki Ramadani. 2020. Lembaga negara independen di Indonesia dalam perspektif konsep Independent Regulatory Agencies. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 27 No. 1.
- Rusman Nurjaman. 2015. Dinamika dan Problematika Implementasi Undang-Undang Desa: Pembelajaran dari Tiga Daerah di Jawa Barat. *Jurnal Desentralisasi*. Volume 13 No. 1.

- S Endang Prasetyawati. 2019. Kedudukan Produk Hukum Dari Fungsi Pengaturan Mahkamah Agung Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional. *Pranata Hukum*. Volume 14 No. 1.
- Seftia Wahyu Nur Efendi and others. 2024. Kepastian Hukum Penetapan Sertifikasi Halal Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *Journal Evidence Of Law*. Volume 3 Nomor 1.
- Situmeang Tomson. 2022. Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Honeste Vivere*. Volume 32 No. 2.
- Sivani Ardi Apritania. 2023. *Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Soerjono dan Sri Mahmudji Soekanto. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiono Margi and Maulida Khazanah. 2019. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Volume 1 No. 3.
- Syamsul Wathoni and Luluk Indarinul Mufidah. 2014. Analisis Kewenangan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu: Perspektif Hukum Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*. Volume 9 Nomor 1.
- Syarifuddin. 2020. *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*. Prenada Media.

- Tareq Jati Pamungkas and Achmad Hariri. 2022. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan jaminan sosial persepektif Welfare State. *Media of Law and Sharia*. Volume 3 No. 4.
- Tyara Devy Purnamasari dan Jadmiko Anom Husodo. 2024. Constitutional Court as an Actor That Maintains Check and Balance System Through the Judicial Review Process in Indonesia. In *International Conference on Cultural Policy and Sustainable Development (ICPSD 2024)*. Atlantis Press.
- Wicipto Setiadi et al. 2024. Reconstruction Draft Testing Regulation Legislation in System Law National: Study Theoretical and Legal to Function Testing in Ensure Supremacy Constitution, *LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities*, Volume 3 Nomor 3, hlm. 49-58.
- Yuniar Riza Hakiki and Taufiqurrahman Taufiqurrahman. 2023. The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision: Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis Ratio Decidendi Dan Obiter Dictum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. Volume 20 No. 1.
- Zahratul Ain Taufik, Ayu Riska Amalia, and Atika Zahra Nirmala. 2023. Penitensier Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. Volume 5 No. 1.
- Zainal Abidin Pakpahan. 2019. Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dpr, Anggota Dpd, Dan

- Anggota Dprd Sebagai Implementasi Pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*. Volume 5 No. 2.
- Zainal Arifin Mochtar. 2016. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zaka Firma Aditya and M. Reza Winata. 2018. Rekontruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Negara Hukum*. Volume 9 Nomor 1.